# DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO

# RENCANA STRATEGIS
# RENSTRA
## 2025 - 2026

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, Bupati yang memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir Tahun 2024 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005);

MEMUTUSKAN ...

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

12. Rencana ...

Dipindai dengan CamScanner

12. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
22. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II ...

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

(3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
h. BAB VIII : PENUTUP.

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
b. Lampiran II : Renstra Dinas Kesehatan
c. Lampiran III : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Lampiran IV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
e. Lampiran V : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
f. Lampiran VI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
g. Lampiran VII : Renstra Dinas Sosial
h. Lampiran VIII : Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

i. Lampiran IX ...

Dipindai dengan CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| i. | Lampiran IX | : | Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| j. | Lampiran X | : | Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| k. | Lampiran XI | : | Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| l. | Lampiran XII | : | Renstra Dinas Perhubungan |
| m. | Lampiran XIII | : | Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| n. | Lampiran XIV | : | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| o. | Lampiran XV | : | Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| p. | Lampiran XVI | : | Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| q. | Lampiran XVII | : | Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| r. | Lampiran XVIII | : | Renstra Dinas Perikanan |
| s. | Lampiran XIX | : | Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| t. | Lampiran XX | : | Renstra Dinas Peternakan |
| u. | Lampiran XXI | : | Renstra Sekretariat Daerah |
| v. | Lampiran XXI.1 | : | Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| w. | Lampiran XXI.2 | : | Renstra Bagian Hukum |
| x. | Lampiran XXI.3 | : | Renstra Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan |
| y. | Lampiran XXI.4 | : | Renstra Bagian Pengadaan Barang / Jasa |
| z. | Lampiran XXI.5 | : | Renstra Bagian Organisasi |
| aa. | Lampiran XXI.6 | : | Renstra Bagian Umum |
| bb. | Lampiran XXII | : | Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| cc. | Lampiran XXIII | : | Renstra Badan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| dd. | Lampiran XXIV | : | Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| ee. | Lampiran XXV | : | Renstra Badan Pendapatan Daerah |
| ff. | Lampiran XXVI | : | Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| gg. | Lampiran XXVII | : | Renstra Inspektorat |
| hh. | Lampiran XXVIII | : | Renstra Kecamatan Lobalain |

ii. Lampiran XXIX ...

Dipindai dengan CamScanner

ii. Lampiran XXIX : Renstra Kecamatan Rote Barat Laut
jj. Lampiran XXX : Renstra Kecamatan Rote Barat Daya
kk. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Rote Barat
ll. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Rote Selatan
mm Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Rote Tengah
nn. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Pantai Baru
oo. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Rote Timur
pp. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ndao Nuse
qq. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Landu Leko
rr. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Loaholu
ss. Lampiran XXXIX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI
### Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV
## PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
### Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V
## PENUTUP
### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

**Mengesahkan**
Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao,

**Anson Tomasuli, SH**
Pembina
NIP.19760214 200604 1 005

Ditetapkan di Baa
Pada tanggal 31 Januari 2024
BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal 31 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024 NOMOR 006

Dipindai dengan CamScanner

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah berakhir pada Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak penyempurnaan dokumen ini. Diharapkan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ba'a,  Januari 2024
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao,

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE-NDAO DINAS PKPLH

**LEKSY N. FOEH, ST**
Pembina Utama Muda
NIP. 19711118 200003 1 003

**DAFTAR ISI**

Halaman


KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... iii
DAFTAR GAMBAR ..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4
1.4 Sistematika Penulisan ..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO..... ..... 7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ..... 7
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ..... 14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ..... 19
2.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO ..... 25
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ..... 25
3.2 Isu Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ..... 26

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 27
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 ..... 27
4.2 Cascading kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ..... 28

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 31
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN ..... 33

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 36
7.1 Target Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 ..... 36
7.2 Target Kinerja Pelenggaraan Urususan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui IKK ..... 36

BAB VIII PENUTUP..... 39

## DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 2.1 Keadaan PNS DPKPLH Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 ..... 14

Tabel 2.2 Keadaan PNS DPKPLH Kab. Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 ..... 15

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai DPKPLH Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat, Golongan dan JabatanTahun 2024 .....15

Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Kontrak DPKPLH Kab. Rote Ndao Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 .....16

Tabel 2.5 Daftar Kendaraan Tahun 2023 .....17

Tabel 2.6 Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya Tahun 2023 .....18

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2023 .....20

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao Periode Tahun 2021-2024 .....21

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... ..... 25

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran, Indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ..... 27

Tabel 4.2 Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 ..... 29

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.....32

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 .....34

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Yang Mengacu PadaTujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026 .....36

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026.....36

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2026 .....37

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao ..... 13

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajin dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Selanjutnya, RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembagunan (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 019 seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

23. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

## 1.3. Maksud Dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

### 1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

**1.** Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

**2** Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

**3** Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini mencakup :

1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.

1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan:

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan:

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mencakup:

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bagian ini mencakup :

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)

3.2 Isu Strategis

Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

**Bab IV Tujuan Dan Sasaran**

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, ditetapkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok: **''Membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup''.**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

Struktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang yakni Bidang Perumahan., Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan.

**2. Sekretaris**

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).

3. **Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan, membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

a. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Seksi Pendataan dan Sosialisasi Perumahan);
b. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan);
c. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pembangunan dan Pengendalian Perumahan);

4. **Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

a. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman);
b. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum);
c. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum);
d. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pertanahan).

5. **Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan**

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan);
b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat);
c. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah).

6. **Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan**

Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan, membawahi 3 (Tiga) sub koordinator terdiri dari:

a. Pengawas Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Analisis Pencegahan Dampak Lingkunga);
b. Pengawas Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Lingkungan);
c. Pengawas Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pemantauan Kualitas Lingkungan).

### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Pengoordinasian perumusan kebijakan, di Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, dan Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
c. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, dan Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
d. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas membawahi Sekretaris, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan dan Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan.

**2. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretarias mempunyai fungsi :

a. Perencanaan operasional Sekretariat sesuai program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan operasional di Sekretariat;
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Koordinator Substansi Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

**3. Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Perumahan. Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan operasional di Bidang Perumahan berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perumahan;
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perumahan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Pendataan dan Sosialisasi Perumahan, Sub Koordinator Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan dan Sub Koordinator Pembangunan dan Pengendalian Perumahan.

**4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan operasional di Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan operasional di Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Sub Koordinator Pertanahan.

**5. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan**

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan operasional di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat dan Sub Koordinator Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah.

**6. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan**

Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan operasional di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan berdasarkan rencana program Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;
c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, Sub Koordinator Data dan Informasi Lingkungan dan Sub Koordinator Pemantauan Kualitas Lingkungan.

### 2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2024 seperti gambar berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

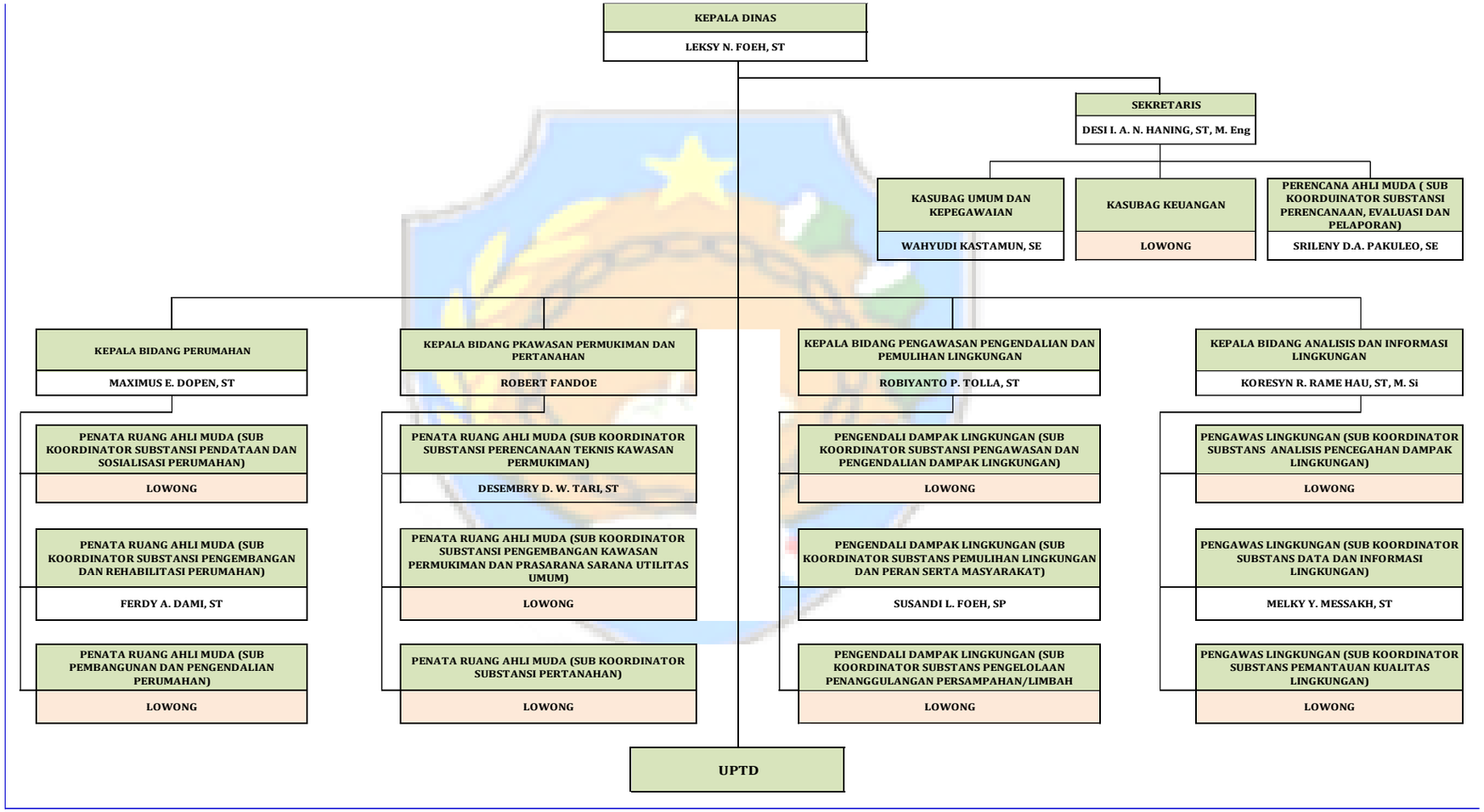


*Sumber data: DPKPLH Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024*

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

   Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional serta yang melaksanakan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Januari 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan perincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3, sedangkan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebanyak 15 (lima belas) orang berdasarkan data per 31 Desember 2023.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh dua) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil DPKPLH Kab. Rote Ndao
Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

| No | Golongan Ruang | Pangkat | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | |
| 1 | IV/c | Pembina Utama Muda | 1 | - | 1 |
| 2 | IV/a | Pembina | 2 | 1 | 3 |
| **Jumlah Golongan IV** | | | **3** | **1** | **4** |
| 3 | III/d | Penata Tk I | 6 | 3 | 9 |
| 4 | III/c | Penata | 2 | - | 2 |
| 5 | III/b | Penata Muda Tk I | 3 | 1 | 4 |
| 6 | III/a | Penata Muda | 5 | - | 5 |
| **Jumlah Golongan III** | | | **13** | **7** | **20** |
| 7 | II/d | Pengatur | 3 | 2 | 5 |
| 8 | II/b | Pengatur Muda Tk. I | 1 | - | 1 |
| **Jumlah Golongan II** | | | **4** | **2** | **6** |
| **TOTAL** | | | **20** | **10** | **30** |

*Sumber Data : DPKPLH Kab. Rote NdaoTahun 2024*

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebanyak 30 (tiga pulug) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang dan golongan II sebanyak 6 (enam) orang. Sedangkan keadaan pegawai Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil DPKPLH Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1 | S3 | - | - | - |
| 2 | S2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | S1 | 15 | 3 | 18 |
| 4 | D III | 1 | 1 | 2 |
| 5 | SLTA/SMK | 6 | 2 | 8 |
| **Total** | | **23** | **7** | **30** |

*Sumber Data : Bapelitbangda Kab. Rote Ndao Tahun 2024*

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 2 (dua) orang, S1 berjumlah 15 (lima puluh) orang, DIII berjumlah 2 (dua) orang dan SLTA/SMK berjumlah 8 (delapan) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai DPKPLH Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Leksy N. Foeh, ST<br>19711118 200003 1 003 | Pembina Utama Muda / IV C | Kepala DPKPLH |
| 2 | Desi I. A. N. Haning, ST, M. Si<br>19791231 200604 2 057 | Pembina/ IV A | Sekretaris |
| 3 | Robert Fandoe<br>19680705 198903 1 019 | Pembina/ IV A | Kabid. Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 4 | Maximus E. Dopen, ST<br>19760322 200312 1 004 | Pembina/ IV A | Kabid. Perumahan |
| 5 | Robiyanto P. Tollla, ST<br>19790115 200604 1 017 | Pembina/ IV A | Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan |
| 6 | Koresyn R. Rame Hau, ST, M. Si<br>19830419 200904 1 002 | Penata Tk. I / IIID | Kabid. Analisis dan Informasi Lingkungan |
| 7 | Wahyudi Kastamun, SE<br>19740509 200501 1 007 | Penata Tk. I / IIID | Kasubag. Umum dan Kepegawaian |
| 8 | Susandi L. Foeh, SP<br>19790223 200501 2 017 | Penata Tk. I / III D | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda |
| 9 | Desembry D. W. Tari, ST<br>19781225 200501 2 016 | Penata Tk. I / III D | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda |
| 10 | Ferdy A. Dami, ST<br>19800219 200604 1 013 | Penata Tk. I / III D | Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda |
| 11 | Srileny D. A. Pakuleo, SE<br>19800409 200701 2 014 | Penata Tk. I / III D | Perencana Ahli Muda |
| 12 | Melky Y. Messakh, ST<br>19780618 201001 1 014 | Penata Tk. I / III D | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda |
| 13 | Dance S. Menno, ST<br>19800525 200604 1 024 | Penata / III C | Pelaksana |
| 14 | Jody R. Oeina, SE<br>19730110 201212 1 005 | Penata / III C | Pelaksana |

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 15 | Elifas Sadjan, SH<br>19771120 200701 1 011 | Penata Muda Tk.I / IIIB | Pelaksana |
| 16 | Septiana Amalo, A. Md<br>19840923 201001 2 036 | Penata Muda Tk.I / IIIB | Pelaksana |
| 17 | Joab E. Sodakh, A. Md<br>19780919 201101 1 003 | Penata Muda Tk.I / IIIB | Pelaksana |
| 18 | Jesy R. J, Henukh, SH<br>19820617 201212 1 003 | Penata Muda / IIIA | Pelaksana |
| 19 | Lifaldy H. Manafe, ST<br>19910405 202012 1 002 | Penata Muda / IIIA | Pelaksana |
| 20 | Charles C. Ndaomanu, ST<br>19930619 202203 1 003 | Penata Muda / IIIA | Pelaksana |
| 21 | Thomianus J. Loe Tae, ST<br>19940608 202203 1 001 | Penata Muda / IIIA | Pelaksana |
| 22 | Semuel A. Diponugroho Johanis, ST<br>19971011 202203 1 003 | Penata Muda / IIIA | Pelaksana |
| 23 | Danial Pah<br>19781227 200604 1 016 | Penata Muda / IIIA | Pelaksana |
| 24 | Marthin Ch. Telienoni<br>19860318 200701 1 002 | Pengatur Tk. I / IID | Pelaksana |
| 25 | Teli E. Faah<br>19720714 201212 2 002 | Pengatur /IIC | Pelaksana |
| 26 | Arni A. Tanesib<br>19810404 201212 1 007 | Pengatur /IIC | Pelaksana |
| 27 | Muhammad S. Pa<br>19851105 201212 1 005 | Pengatur /IIC | Pelaksana |
| 28 | Marthen Pandie<br>19830509 201212 1 004 | Pengatur /IIC | Pelaksana |
| 29 | Selfiana H. Tassi<br>19850410 201406 2 012 | Pengatur /IIC | Pelaksana |
| 30 | Yan O. Pa<br>19850101 201212 1 002 | Pengatur Muda Tk. I /IIB | Pelaksana |

*Sumber Data : DPKPLH Kab. Rote Ndao Tahun 2024*

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao di dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Tenaga Kontrak DPKPLH Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | |
| 1 | Very D. Ndoen | Sopir Pimpinan | 1 | - | 1 |
| 2 | Semy Nock | Cleaning Service | 1 | - | 1 |
| 3 | Noak H. Boik | Penjaga Kantor | 1 | - | 1 |
| 4 | Ipin I. Maakh | Tenaga Administrasi | - | 1 | 1 |
| 5 | Ingke W. Sui | Tenaga Administrasi | - | 1 | 1 |
| 6 | Inggried E. Haning, ST | Tenaga Administrasi | - | 1 | 1 |
| 7 | Joko Pau | Tenaga Administrasi | 1 | - | 1 |
| 8 | Constantinus Ndolu, SE | Tenaga Administrasi | 1 | - | 1 |
| 9 | Lidian Pah | Tenaga Administrasi | - | 1 | 1 |
| 10 | Polce Mandala | Tenaga Administrasi | 1 | - | 1 |
| 11 | Yohanis Mbau | Tenaga Administrasi | 1 | - | 1 |
| 12 | Sara Kollo | Tenaga Administrasi | - | 1 | 1 |
| **Total** | | | **7** | **5** | **12** |

*Sumber Data: DPKPLH Kab. Rote Ndao Tahun 2023*

Dilihat dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao berjumlah 15 (dua belas) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan yang menduduki jabatan penjaga kantor sebanyak 1 (satu) orang, cleaning service sebanyak 1 (satu) orang, sopir 1 (satu) orang, tenaga administrasi 9 (sembilan) orang. Selain jabatan penjaga kantor, clearning service dan sopir, ada juga tenaga kebersihan kota berjumlah 44 orang yang terdiri dari laki-laki 29 (dua puluh Sembilan) orang dan Perempuan 15 (lima belas) orang.

2. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan sarana dan prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini aset yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Kendaraan Dinas

Tabel 2.5
Daftar Kendaraan Dinas Tahun 2023

| No. | Merk/Tipe | No. Polisi | Tahun Pembelian | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitsubishi/L300 BC (4x2) M/T | DH 114 YU | 2007 | 1 Unit | Rusak Berat |
| 2. | Suzuki/Mega Carry Extra NIK 2014 | DH 9942 YU | 2013 | 1 Unit | Baik |
| 3. | Toyota Dyna 6 R 130 PSHT 3S | DH 9946 YU | 2015 | 1 Unit | Baik |
| 4. | Toyota/Dyna 130 PS HT | DH 9959 YU | 2016 | 1 Unit | Baik |
| 5. | Honda NF 100 SL/SUUPRA FIT S | DH 5642 G | 2006 | 1 unit | Rusak Ringan |
| 6. | Honda NF 100 SL/SUUPRA FIT S | DH 5641 YU | 2006 | 1 unit | Rusak Berat |
| 7. | Honda NF 100/SUUPRA FIT S | DH 5128 YU | 2007 | 1 unit | Rusak Ringan |
| 8. | Yamaha/Vixion Advance | DH 5988 YU | 2016 | 1 Unit | Baik |
| 9. | Yamaha 2sx/Yamaha New Soul | DH 5987 YU | 2016 | 1 Unit | Baik |
| 10. | YAMAHA/2TP | DH 5986 YU | 2016 | 1 Unit | Baik |
| 11. | YAMAHA/LEXI VIN 2018 | DH 3035 VB | 2019 | 1 unit | Baik |
| 12. | Honda/New Megapro | DH 5704 G | 2011 | 1 Unit | Baik |
| 13. | Yamaha/3C1 (V-IXION) | DH 5820 YU,DH 5821 YU | 2013 | 2 Unit | Baik |
| 14. | Honda/NF 11B2D 12M/T | DH 5888 YU | 2013 | 1 Unit | Baik |
| 15. | V-IXION/3C1 (V-IXION) | DH 5822 VB | 2013 | 1 Unit | Baik |
| 16 | YAMAHA/50C (T 135 HC) | DH 5896 WH | 2014 | 1 Unit | Baik |
| 17. | Yamaha 50CT | DH 5899 VB | 2014 | 1 Unit | Baik |
| 18. | VR 150 3R/VIAR | DH 2070 WT, DH 2071 WT, DH 2072 WT | 2023 | 3 Unit | Baik |
| 19. | Truck Hino/XZU 349 R-HKFT BD3 (4X2) M/T | DH 9017 WT | 2023 | 1 unit | Baik |

*Sumber Data: DPKPLH Kab. Rote Ndao Tahun 2023*

Berdasarkan dari tabel 2.5 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dinas pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao berjumlah 19 (sembilan belas) unit yang terdiri dari kendaraan roda 6 (enam) berjumlah 3 unit, 2 unit kondisi baik dan 1 rusak berat, kendaraan roda 4 berjumlah 2 (dua) unit kondisi baik, kendaraan roda 3 berjumlah 3 unit kondisi baik dan kendaraan roda 2 berjumlah 11 (sebelas) unit, dengan kondisi rusak berat 1 unit, rusak ringan 2 unit dan 8 unit kondisi baik.

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Tabel 2.6
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya Tahun 2023

| No | Jenis Barang /Nama Barang | Merk/Type | Jumlah | Ket |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Komputer PC | Acer | 6 unit | 4 Baik, 2 Rusak Ringan |
| 2 | Laptop | Asus, Lenovo | 9 unit | 8 Baik, 1 Rusak Ringan |
| 3 | Notebook | Asus | 4 unit | Rusak Ringan |
| 4 | Printer | Epson,Canon | 5 unit | Baik |
| 5 | Air Conditioning | LG | 3 unit | 2 Baik, 1 Rusak Ringan |
| 6 | Meja Kerja Pimpinan | Informa Montana | 1 Unit | Baik |
| 7 | Meja Kerja | Kayu | 37 Unit | Baik |
| 8 | Meja Rapat | Kayu | 5 Unit | Baik |
| 9 | Kursi Kerja Pimpinan | Informa Coucil | 1 Unit | Baik |
| 10 | Kursi Tamu | Sofa | 1 Unit | Baik |
| 11 | Kursi Kerja | Kayu | 10 Unit | Baik |
| 12 | Rak Arsip | Kayu | 16 Unit | 6 Baik, 10 Rusak Ringan |
| 13 | Lemari Buku Pimpinan | Kayu | 1 Unit | Baik |
| 14 | Lemari Arsip | Kayu | 6 Unit | 2 Baik, 4 Rusak Ringan |
| 15 | Lemari Arsip | Kaca | 9 Unit | Baik |
| 16 | Global Positioning System (GPS) | Garmin | 3 Unit | Baik |
| 17 | Stpwatch | Sakana | 1 Unit | Baik |
| 18 | Theodolite | | 1 Unit | Baik |
| 19 | Camera + Attachment | Canon | 2 Unit | Baik |

Berdasarkan dari tabel 2.6 jumlah peralatan kantor dan asset lainnya berjumlah 121 unit, dengan kondisi baik 99 (sembilan puluh sembilan) unit, rusak ringan 22 (dua puluh dua) unit.

c. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

1. Bangunan Gedung/Kantor

   Adapun bangunan gedung kantor yang tercatat pada aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :

   a. Bangunan Gedung Laboratorium Lingkungan;
   b. Bangunan Gedung Aula Dinas PKPLH dengan luas 83 $M^2$

2. Tanah

   Aset tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diperoleh melalui proses hibah yaitu:

   - Tanah untuk pembuangan dan pengolahan sampah dengan luas 80.000 $M^2$ terletak di Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.7 dan tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2021-2023

| INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN | TARGET SPM | TARGET IKU | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA TAHUN | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Perbaikan rumah tidak layak huni (unit) | | √ | | | 5589 | 7539 | 9414 | 5602 | 6265 | 6310 | 100,23 | 83,10 | 67,03 |
| Luas lahan bersertifikat (Ha) | | √ | | | 92 | 138 | 184 | 103,44 | 139,36 | 152,44 | 112,43 | 100,99 | 82,85 |
| Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya (Ha) | | √ | | | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1,582 | 1587,36 | 1587,36 | 100 | 100339 | 100339 |
| Meningkatnya pengelolaan sampah (%) | | √ | | | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 54,73 | 72,49 | 71,66 | 228,04 | 278,81 | 265,41 |
| Indeks kualitas air (poin) | | √ | | | 62,08 | 62,18 | 62,28 | 60,30 | 50,00 | 51,67 | 97,13 | 80,41 | 82,96 |
| Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak (%) | | √ | | | 71,65 | 76,56 | 84,75 | 71,65 | 76,56 | 81,02 | 100 | 100 | 95,60 |
| Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani (%) | | √ | | | 49,73 | 55,62 | 56,20 | 49,73 | 55,62 | 56,02 | 100 | 100 | 100 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | | √ | | | 71,60 | 67,77 | 71,39 | 71,60 | 67,77 | 69,59 | 100 | 100 | 97,48 |
| Indeks Kualitas Air (Poin) | | √ | | | 60,30 | 50,00 | 62,28 | 60,30 | 50,00 | 51,67 | 100 | 100 | 82,96 |
| Persentase Penanganan Sampah (%) | | √ | | | 54,73 | 26,00 | 27,00 | 54,73 | 72,49 | 71,66 | 100 | 279 | 265,41 |
| Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | √ | | √ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | | | √ | | 16,91 | 17,09 | 16,95 | 16,91 | 17,09 | 16,95 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | | | √ | | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 100 | 100 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten | | | √ | | 71,60 | 67,77 | 71,39 | 71,60 | 67,77 | 69,59 | 100 | 100 | 97 |
| Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten | | | √ | | 71,60 | 67,77 | 27,00 | 71,60 | 67,77 | 27,00 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2021-2024

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke | | | | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 3 | 4 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| | **Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran** | **100 %** | **3,750,172,400** | **100 %** | **3,831,840,000** | **100 %** | **2,387,256,000** | **100 %** | **2,604,983,800** | **100** | **3,400,689,387** | **100** | **3,510,039,039** | **100** | **2,352,875,014** | | |
| | | **Terwujudnya sarana dan prasarana kantor** | **100 %** | | **100 %** | | **100 %** | | **100 %** | | **100** | | **100** | | **100** | | | |
| 1 | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 19 Dok | 33,655,000 | 19 Dok | 33,655,000 | 19 Dok | 33,655,000 | 19 Dok | 33,655,000 | 19 | 33,655,000 | 19 | 33,643,000 | 19 | 33,640,000 | | |
| 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja Induk, Renja Perubahan, Profil OPD, RKT, PK Induk, PK Perubahan, RAK, RKA induk, RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan | 12 Dok | 18,355,000 | 12 Dok | 18,355,000 | | | | | 12 | 18,355,000 | 12 | 18,345,000 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 12 Dok | 18,355,000 | 12 Dok | 18,355,000 | | | | | 12 | 18,350,000 | | |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, dan Evaluasi Renja Per Triwulan | 7 Dok | 15,300,000 | 7 Dok | 15,300,000 | | | | | 7 | 15,300,000 | 7 | 15,298,000 | | | | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 7 Laporan | 15,300,000 | 7 Laporan | 15,300,000 | | | | | 7 | 15,290,000 | | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 32 Org/Bln | 2,721,072,400 | 32 Org/Bln | 2,668,149,000 | 32 Org/Bln | 2,102,631,000 | 32 Org/Bln | 2,243,937,800 | 32 | 2,434,488,099 | 32 | 2,359,361,260 | 31 | 2,073,724,623 | | |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 32 Org | 2,623,218,400 | 32 Org/Bln | 2,570,295,000 | | | | | 32 | 2,336,634,099 | 32 | 2,261,521,260 | | | | |
| | | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 32 Org/Bln | 2,040,951,000 | 32 Org/Bln | 2,192,817,800 | | | | | 31 | 2,012,044,623 | | |
| 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | Tersedianya Honor Pengelola APBD | 8 Org | 97,854,000 | 8 Org | 97,854,000 | | | | | 8 | 97,854,000 | 8 | 97,840,000 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 12 Dok | 61,680,000 | 12 Dok | 51,120,000 | | | | | 12 | 61,680,000 | | |
| 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan dan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 Org/Bln | 9,000,000 | 2 Org/Bln | 9,000,000 | 2 Dok | 9,000,000 | 2 Dok | 9,000,000 | 1 | 8,970,000 | 2 | 9,000,000 | 2 | 9,000,000 | | |
| 5 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah | 1 Org/Bln | 9,000,000 | 2 Org/Bln | 9,000,000 | | | | | 1 | 8,970,000 | 2 | 9,000,000 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | 2 Dok | 9,000,000 | 2 Dok | 9,000,000 | | | | | 2 | 9,000,000 | | |
| 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya tenaga kontrak daerah | 48 Org/Bln | 720,000,000 | 48 Org/Bln | 720,000,000 | | | | | 48 | 667,500,000 | 48 | 716,250,000 | | | | |
| 6 | Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Daerah | 48 Org/Bln | 720,000,000 | 48 Org/Bln | 720,000,000 | | | | | 48 | 667,500,000 | 48 | 716,250,000 | | | | |
| 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 173,575,000 | 100 % | 294,203,000 | 100 % | 163,057,000 | 100 % | 195,199,000 | 100 | 169,975,046 | 100 | 293,704,703 | 100 | 161,461,330 | | |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 1,060,000 | 12 Bulan | 1,060,000 | | | | | 12 | 1,060,000 | 12 | 1,060,000 | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | 1 Paket | 1,060,000 | 1 Paket | 1,060,000 | | | | | 1 | 1,060,000 | | |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | - | 5 Unit | 30,050,000 | | | | | | | 5 | 30,049,000 | | | | |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | | | | | 2 Paket | 17,500,000 | 2 Paket | 18,700,000 | | | | | 2 | 17,500,000 | | |
| 9 | Penyediaan Bahan / Material | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | 12 Bulan | 25,541,000 | | | | | | | 12 | 25,541,000 | | | | | | |
| | | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | | | 12 Bulan | 25,541,000 | | | | | | | 12 | 25,541,000 | | | | |
| | | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | 12 Bulan | | | | | | | | 12 | | | | | |
| | | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 2 Paket | 25,529,000 | 2 Paket | 25,000,000 | | | | | 2 | 25,529,000 | | |
| 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | 22,000,000 | 12 Bulan | 22,000,000 | | | | | 12 | 22,000,000 | 12 | 22,000,000 | | | | |
| | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang | | | | | 2 Paket | 22,000,000 | 2 Paket | 22,000,000 | | | | | 2 | 22,000,000 | | |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi | 49 Kali | 124,974,000 | 25 Kali | 215,552,000 | | | | | 49 | 121,374,046 | 25 | 215,054,703 | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 10 Laporan | 96,968,000 | 20 Laporan | 128,439,000 | | | | | 1 | 95,372,330 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 37,701,000 | 100 | % | 37,364,000 | 100 | % | 37,363,000 | 100 | % | 42,117,000 | 100 | 31,391,373 | 100 | 36,050,440 | 100 | 34,742,016 | | |
| 13 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan materai | 12 | Bulan | 3,625,000 | 12 | Bulan | 3,289,000 | | | | | | | 12 | 3,619,000 | 12 | 3,289,000 | | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | | | | | | | 30 | Laporan | 3,288,000 | 12 | Laporan | 3,042,000 | | | | | 30 | 3,288,000 | | |
| 14 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pembayaran rekening telepon/internet, air dan listrik | 12 | Bulan | 34,076,000 | 12 | Bulan | 34,075,000 | | | | | | | 12 | 27,772,373 | | | | | | |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | | | | | | | 12 | Laporan | 34,075,000 | 12 | Laporan | 39,075,000 | | | 12 | 32,761,440 | 12 | 31,454,016 | | |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 55,169,000 | 100 | % | 69,469,000 | 100 | % | 41,550,000 | 100 | % | 81,075,000 | 100 | 54,709,869 | 100 | 62,029,636 | 100 | 40,307,045 | | |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional | 17 | Unit | 50,200,000 | 13 | Unit | 64,500,000 | | | | | | | 17 | 49,740,869 | 13 | 57,060,636 | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | | | 22 | Unit | 41,550,000 | 20 | Unit | 81,075,000 | | | | | 22 | 40,307,045 | | |
| 16 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya | 9 | Unit | 4,969,000 | 9 | Unit | 4,969,000 | | | | | | | 9 | 4,969,000 | 9 | 4,969,000 | | | | |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara | | | | | | | | | | 16 | Unit | - | | | | | | | | |
| **II** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah** | **100** | **%** | **95,200,000** | **100** | **%** | **95,200,000** | **100** | **%** | **95,200,000** | **100** | **%** | **95,200,000** | **100** | **95,200,000** | **100** | **95,200,000** | **100** | **95,200,000** | | |
| 10 | Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan dan rehabiltasi rumah korban bencana dan relokasi akibat program pemeritah | 2 | Dok | 95,200,000 | 2 | Dok | 95,200,000 | 2 | Dok | 95,200,000 | 2 | Dok | 95,200,000 | 2 | 95,200,000 | 2 | 95,200,000 | 2 | 95,200,000 | | |
| 17 | Rehabiltasi Rumah Bagi Korban Bencana | Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah | 2 | Unit | 95,200,000 | 2 | Unit | 95,200,000 | | | | | | | 2 | 95,200,000 | 2 | 95,200,000 | | | | |
| | | Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi | | | | | | | 2 | Unit | 95,200,000 | 2 | Unit | 95,200,000 | | | | | 2 | 95,200,000 | | |
| **III** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase rumah layak huni** | **71.65** | **%** | **11,637,870,708** | **76.56** | **%** | **8,987,425,700** | **84.75** | **%** | **1,656,545,700** | **84,82** | **%** | **1,273,015,700** | **71.65** | **11,637,810,708** | **76.56** | **8,987,070,850** | **,84.02** | **1,656,535,700** | | |
| 11 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar | Cakupan permukiman layak | | | | 1 | Dok | 150,000,000 | | | | 1 | Dok | 441,470,000 | | | 1 | 149,645,150 | | | | |
| 18 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Terlaksananya penyusunan Ranpeda tentang kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Rote Ndao | | | | 1 | Dokumen | 150,000,000 | | | | | | | | - | 1 | 149,645,150 | | | | |
| | | Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/tereview/terlegalisasi | | | | | | | | | | 1 | Dokumen | 441,470,000 | | | | | | | | |
| 12 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar | Cakupan permukiman layak | 374 | Unit | 11,637,870,708 | 243 | Unit | 8,837,425,700 | 45 | Unit | 1,656,545,700 | 20 | Unit | 831,545,700 | 374 | 11,637,810,708 | 243 | 8,837,425,700 | 45 | 1,656,535,700 | | |
| 19 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Pembangunan rumah layak huni | 374 | Unit | 11,637,870,708 | 243 | Unit | 8,837,425,700 | | | | | | | 374 | 11,637,810,708 | 243 | 8,837,425,700 | | | | |
| | | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | | | | | | | 45 | Unit | 1,656,545,700 | 20 | Unit | 831,545,700 | | | | | 45 | 1,656,535,700 | | |
| **IV** | **PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM** | **Meningkatnya sarana dan prasarana utilitas umum** | | | **-** | **100** | **%** | **255,000,000** | **100** | **%** | **165,059,000** | | | | | | **100** | **251,940,000** | **100** | **134,818,900** | | |
| 13 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Cakupan permukiman layak | | | | 7 | Unit | 255,000,000 | 11 | Lokasi | 165,059,000 | | | - | | - | 7 | 251,940,000 | 11 | 134,818,900 | | |
| 20 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang di Kawasan Permukiman | | | | 7 | Unit | 255,000,000 | | | | | | | | | 7 | 251,940,000 | | | | |
| | | Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian | | | | | | | 11 | Lokasi | 165,059,000 | | | | | | | | 11 | 134,818,900 | | |
| **V** | **PENATAGUNAAN TANAH** | **Luas lahan bersertifikat** | **92** | **Ha** | **655,000,000** | **138** | **Ha** | **250,000,000** | **184** | **Ha** | **200,190,000** | **230** | **Ha** | **200,000,000** | | **282,962,800** | | **213,740,000** | | **198,841,800** | | |
| 14 | Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daaerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya penggunaan tanah | | | 655,000,000 | 300 | M2 | 250,000,000 | 56 | Dokumen | 200,190,000 | 56 | Dok | 200,000,000 | | 282,962,800 | 300 | 213,740,000 | 56 | 198,841,800 | | |
| 21 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelaksanaan KJPP | 1 | Paket | 75,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Sertifikasi tanah pemerintah | 805854 | M2 | 580,000,000 | 300 | M2 | 250,000,000 | | | | | | | 713584 | 282,962,800 | 300 | 213,740,000 | | | | |
| | | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 56 | Dokumen | 200,190,000 | 56 | Dokumen | 200,000,000 | | | | | 56 | 198,841,800 | | |
| **VI** | **PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Meningkatnya perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup** | **100** | **%** | **320,000,000** | **100** | **%** | **461,104,300** | **100** | **%** | **280,000,000** | **100** | **%** | **242,859,000** | **100** | **317,930,111** | **100** | **458,489,900** | **100** | **279,622,250** | | |
| 15 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 0 | 0% | - | 1 | Dokumen | 341,104,300 | | | | | | | | | 1 | 338,755,900 | | | | |
| 23 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyusunan Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Kabupaten Rote Ndao | | | | 1 | Dokumen | 341,104,300 | | | | | | | | | 1 | 338,755,900 | | | | |
| | | Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1 | Dokumen | 320,000,000 | 1 | Dokumen | 120,000,000 | 1 | Dokumen | 280,000,000 | 1 | Dokumen | 242,859,000 | 1 | 317,930,111 | 1 | 119,734,000 | 1 | 279,622,250 | | |
| 24 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang | Terlaksananya validasi RDTR kawasan perkotaan Baa | 1 | Dokumen | 120,000,000 | 1 | Dokumen | 120,000,000 | | | | | | | 1 | 119,970,000 | 1 | 119,734,000 | | | | |
| | | Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 279,622,250 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Validasi KLHS terhadap Revisi RPJPD/RPJMD | 1 | Dokumen | 200,000,000 | | | | | | | | 1 | 197,960,111 | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun | | | | | | 1 | Dokumen | 280,000,000 | 1 | Dokumen | 242,859,000 | | | | | 1 | 279,622,250 | |
| **VII** | **PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN** | **Indeks pencemaran air** | **100** | **%** | **247,444,900** | **100** | **%** | **247,444,900** | **100** | **%** | **225,000,000** | **100** | **%** | **225,000,000** | **100** | **243,248,100** | **100** | **245,461,900** | **100** | **221,897,000** | |
| 17 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup | 100 | % | 105,000,000 | 100 | % | 105,000,000 | 100 | % | 175,000,000 | 100 | % | 175,000,000 | 100 | 103,210,200 | 100 | 103,455,000 | 100 | 173,001,000 | |
| 26 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Pemantauan dan pegujian kualitas air dan kualitas udara (MA. Siukoen, MA. Tilonisi, MA. Tanggaloi, MA. Oemau, Kali Menggelama, Pelabuhan Baa, TPI Tulandale) | 8 | Titik | 75,000,000 | 8 | Titik | 75,000,000 | | | | | | | 8 | 73,585,200 | 7 | 73,605,000 | | | |
| | | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut | | | | | | | 1 | Dokumen | 75,000,000 | 1 | Dokumen | 75,000,000 | | | | | 1 | 73,111,000 | |
| 27 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Terlaksananya peringatan hari bumi | 1 | Kegiatan | 30,000,000 | 1 | Kegiatan | 30,000,000 | | | | | | | 1 | 29,625,000 | 1 | 29,850,000 | | | |
| | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | | | | | | | 1 | Dokumen | 100,000,000 | 1 | Dokumen | 100,000,000 | | | | | 1 | 99,890,000 | |
| 18 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup | 100 | % | 142,444,900 | 100 | % | 142,444,900 | 100 | % | 50,000,000 | 100 | % | 50,000,000 | 100 | 140,037,900 | 100 | 142,006,900 | 100 | 48,896,000 | |
| 28 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | Tersedianya Dokumen IKPLHD | 1 | Dokumen | 75,000,000 | 1 | Dokumen | 75,000,000 | | | | | | | 1 | 72,623,000 | 1 | 74,682,000 | | | |
| | | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | | | | | | | 1 | Laporan | 50,000,000 | 1 | Laporan | 50,000,000 | | | | | 1 | 48,896,000 | |
| 29 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Perlindungan Mata Air Penyusunan Data Base Mata Air | 2 | Paket | 67,444,900 | 1 | Paket | 67,444,900 | | | | | | | 2 | 67,414,900 | 1 | 67,324,900 | | | |
| **VIII** | **PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau** | **100** | **%** | **75,000,000** | **100** | **%** | **75,000,000** | **100** | | | | | | **100** | **74,000,000** | **100** | **74,716,000** | | | |
| 19 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup | 1505 | Anakan | 75,000,000 | 1660 | Anakan | 75,000,000 | | | | | | | 1505 | 74,000,000 | 1660 | 74,716,000 | | | |
| 30 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Tersedianya Benih/anakan tanaman produktif | 1505 | Anakan | 75,000,000 | 1660 | Anakan | 75,000,000 | | | | | | | 1505 | 74,000,000 | 1660 | 74,716,000 | | | |
| | | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IX** | **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **100** | **%** | **46,000,000** | **100** | **%** | **46,000,000** | **100** | | | | | | **100** | **45,895,000** | **100** | **45,910,000** | | | |
| 20 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup | 4 | Dokumen | 46,000,000 | 4 | Dokumen | 46,000,000 | | | | | | | 4 | 45,895,000 | 4 | 45,910,000 | | | |
| 31 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya dokumen pengawasan per triwulan | 4 | Dokumen | 46,000,000 | 4 | Dokumen | 46,000,000 | | | | | | | 4 | 45,895,000 | 4 | 45,910,000 | | | |
| | | Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **X** | **PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Meningkatnya pengelolaan sampah** | **24** | **%** | **679,496,000** | **26** | **%** | **670,000,000** | **27** | **%** | **3,641,398,000** | **72** | **%** | **962,658,000** | **54.73** | **627,527,000** | **72.49** | **620,029,500** | **71.66** | **3,488,703,579** | |
| 21 | Pengelolaan Sampah | Meningkatnya pengelolaan sampah | 21000 | M3 | 679,496,000 | 21000 | M3 | 670,000,000 | | | 3,641,398,000 | | | | 21000 | 627,527,000 | 21000 | 620,029,500 | 1 | 3,488,703,579 | |
| 32 | Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengadaan dan penyediaan sarpras persampahan | 21000 | M3 | 679,496,000 | 21000 | M3 | 670,000,000 | | | | | | | 21000 | 627,527,000 | 21000 | 620,029,500 | | | |
| | | Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | 105 | Ton | 3,337,678,000 | 5272 | Ton | 962,658,000 | | | | | 105 | 3,190,588,579 | |
| 33 | Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan | Tersedianya perda/perbup tentang pengelolaan sampah dan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | | | | | | 1 | Dokumen | 303,720,000 | | | | | | | | 1 | 298,115,000 | |
| | | | **100** | **%** | **17,506,184,008** | **100** | **%** | **14,919,014,900** | **100** | **%** | **8,650,648,700** | **100** | **%** | **5,603,716,500** | **100** | **16,725,263,106** | **100** | **14,502,597,189** | **100** | **8,428,494,243** | |

Semua program, kegiatan dan sub Kegiatan peningkatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao terlaksana dengan baik, namun ada beberapa faktor yang menghambat dan mendorong pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Rote Ndao yaitu :

1. Faktor Penghambat
    a. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional dinas
    c. Terbatasnya alokasi anggaran sehingga mengakibatkan program/kegiatan tidak dilaksanakan dengan baik
    d. Belum adanya masterplan (rencana induk) bidang perumahan dan Kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup
    e. Lemahnya penegakan aturan dibidang lingkungan hidup
2. Faktor Pendorong
    a. Dari sisi SDM tersedia banyak tenaga ASN muda yang memiliki latar belakang kemampuan teknis yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dinas
    b. Adanya jejating Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dan NGO dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan pengelolaan lingkungan hidup
    c. Pembangunan yang berbasis pada prinsip berkelanjutan menjadi arus utama Pembangunan baik di level global, nasional dan daerah
    d. Meningkatnya kesadaran akan perlunya penyediaan regulasi pengelolaan lingkungan dan dan Upaya-upaya penegakan aturan-aturan dimaksud

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DInas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yaitu kelompok sasaran layanan pengelolaan sampah, perijinan lingkungan dan penerima bantuan rumah layak huni. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DInas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao juga menjalin mitra kerja sama dengan stakeholder terkait seperti LSM dan Perguruan Tinggi.

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
# DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANLINGKUNGAN HIDUP
# KABUPATEN ROTE NDAO

## 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | Upaya penyediaan rumah layak huni belum optimal | Rendahnya kualitas perumahan bagi masyarakat |
| | | | Masih terdapat banyak rumah yang belum layak huni |
| | | | Belum tersusunnya dokumen RP2KP |
| | | Masih banyak aset pemda belum bersertifikat | Kelengkapan dokumen dalam pengurusan sertifikasi tanah |
| | | | Penyampaian data dan dokumen perencanaan dari perangkat daerah tidak tepat waktu |
| 2 | Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup | Tidak berfungsinya laboratorium lingkungan | Pengujian kualitas air belum optimal |
| | | Ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan | Rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam mematuhi aturan perizinan lingkungan hidup |
| | | Penanganan sampah belum optimal | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah |
| | | | Wilayah Layanan sampah hanya sebatas Kota Ba'a |

## 3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas rumah layak huni bagi masyarakat
2. Meningkatnya legalitas aset-aset pemerintah
3. Optimalisasi pemanfaatan laboratorium lingkungan
4. Meningkatnya layanan sampah

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

### 4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
2. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.

### 4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 antara lain:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat;
2. Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan;
3. Meningkatnya penanganan sampah.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**
**Tujuan dan Sasaran, Indikator Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao**

| NO | RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) | | RENSTRA | | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SPM/IKK/I LAINNYA | KINERJA AWAL | | TARGET CAPAIAN | | AKHIR RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | REALISASI | TARGET | | | |
| | TUJUAN | SASARAN | TUJUAN | SASARAN | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan** | | | | Indeks kualitas infrastruktur (%) | IKU | 73.00 | 78.00 | 80.39 | 82.78 | 82.78 |
| | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | IKU | 69.59 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur | | | Persentase Perbaikan Rumah Layak Huni (%) | IKU | 56.02 | 56.20 | 56.37 | 56.55 | 56.55 |
| | | | **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman** | | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak (%) | IKD | 81.02 | 84.82 | 84.86 | 84.89 | 84.89 |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat | Persentase Rumah Layak Huni Terbangun (%) | IKD | 56.02 | 56.20 | 56.37 | 56.55 | 56.55 |
| | | | **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | IKD | 69.59 | 70.00 | 77,59 | 77,72 | 77,72 |
| | | | | Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan | Indeks Kualitas Air (Poin) | IKD | 51.67 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| | | | | Meningkatnya penanganan sampah | Volume Sampah yang Dikurangi (Ton) | IKD | 1.544 | 1.555 | 1.571 | 1.604 | 1.604 |

## 4.2. Cascading Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

# Tabel 4.2
## Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026

| TUJUAN | SASARAN | | PPROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) | SATUAN | TARGET KINERJA AWAL TAHUN 2024 | TARGET KINERJA | | | UNIT KERJA/BIDANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR KINERJA | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Sekretariat** |
| | | | | **Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | |
| | | | | **Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | |
| | | | | **Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | |
| | | 1 | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu | Dok | 19 | 19 | 19 | 38 | |
| | | 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dok | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| | | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 7 | 7 | 7 | 14 | |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Org/Bln | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| | | 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Dok | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| | | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 5 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dok | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | Paket | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Paket | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| | | 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 10 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 20 | 20 | 20 | 40 | |
| | | 5 | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| | | 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 12 | 24 | |
| | | 13 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 14 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 20 | 19 | 19 | 38 | |
| **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman** | | | | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak | **%** | **84,82** | **84,86** | **84,89** | **84,89** | |
| | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat | | | Persentase Rumah Layak Huni Terbangun | **%** | **56,20** | **56,37** | **56,55** | **56,55** | |
| | | II | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan** |
| | | 7 | Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan rumah bagi korban bencana | Unit | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 15 | Rehabiltasi Rumah Bagi Korban Bencana | Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi | Unit | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | III | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase rumah layak huni terbangun** | **%** | **56.20** | **56.37** | **56.55** | **56.55** | |
| | | 8 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar | Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 16 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/tereview/terlegalisasi | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 9 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni | Unit | 45 | 20 | 20 | 40 | |
| | | 17 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | Unit | 45 | 20 | 20 | 40 | |
| | | IV | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase Luas Lahan Pemda Bersertifikat** | **%** | **10.43** | **11.27** | **12.29** | **12.29** | |
| | | 10 | Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daaerah Kabupaten/Kota | Jumlah sertifikat tanah pemda | Dokumen | 56 | 56 | 56 | 112 | |
| | | 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kab/kota | Dokumen | 56 | 56 | 56 | 112 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | **Poin** | **70,00** | **77,59** | **77,72** | **77,72** | |
| | Terjaganya Kualias Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan | | | Indeks Kualitas Air | **Poin** | **52,00** | **52,00** | **52,00** | **52,00** | |
| | | **V** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kehati Lingkungan Hidup** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan** |
| | | 11 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 19 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | **VI** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | **Poin** | **70.00** | **77,59** | **77,72** | **77,72** | **Bidang P3L, Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan** |
| | | 12 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| | | 20 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 21 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 13 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | 22 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | | **VII** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan kehati** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Bidang P3L** |
| | | 14 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 23 | Penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | **VIII** | **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | **Bidang P3L, Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan** |
| | | 15 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah | Laporan | | 20 | 20 | 40 | |
| | | 24 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Laporan | | 20 | 20 | 40 | |
| | Meningkatnya Penanganan Sampah | | | Volume Sampah Yang Dikurangi | **Ton** | **1.555** | **1.571** | **1.604** | **1.604** | |
| | | **IX** | **PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Volume Sampah Yang Dikurangi** | **Ton** | **1.555** | **1.571** | **1.604** | **1.604** | **Bidang P3L** |
| | | 16 | Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah terangkut | Ton | 5297.20 | 5.486 | 5.486 | 10.972 | |
| | | 25 | Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | Ton | 5297.20 | 5.486 | 5.486 | 10.972 | |
| | | | | | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** | |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. Meningkatkan upaya legalisasi aset-aset pemerintah
3. Mengoptimalisasikan pemanfaatan laboratorium lingkungan
4. Meningkatkan layanan persampahan
5. Penegakan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

## 5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. Sertifikasi tanah pemerintah
3. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan terhadap media tanah, air; dan udara
5. Sosialisasi, penguatan data dan informasi lingkungan
6. Penanganan sampah melalui pengangkutan
7. Peningkatan Kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pengelolaan persampahan

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat | Meningkatkan upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah | Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah |
| | | Meningkatkan upaya legalisasi aset-aset pemerintah | Sertifikasi tanah pemerintah |
| Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan | Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan | Mengoptimalisasikan pemanfaatan laboratorium lingkungan | Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan terhadap media tanah. air dan udara |
| | | Penegakan aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Sosialisasi, penguatan data dan informasi lingkungan |
| | | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | Meningkatnya penanganan sampah | Meningkatkan layanan persampahan | Penanganan sampah melalui pengangkutan |
| | | | Peningkatan Kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pengelolaan persampahan |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

# Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

## Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026

| Tujuan | Sasaran | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2025 | | | Tahun 2026 | | | Kond. Knj Pd Akhir Periode Renstra PD | | | | |
| | | | | | | Target | | Rp | Target | | Rp | Target | | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| | | **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu** | | **100** | **%** | **2,604,983,000** | **100** | **%** | **2,604,983,000** | **100** | **%** | **5,209,966,000** | **Sekretariat** | **Kab. RN** |
| | | | | **Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah** | | **100** | **%** | | **100** | **%** | | **100** | **%** | | | |
| | | | | **Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu** | | **100** | **%** | | **100** | **%** | | **100** | **%** | | | |
| | | | | **Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik** | | **100** | **%** | | **100** | **%** | | **100** | **%** | | | |
| | | 1 | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu | | 19 | Dok | 33,655,000 | 19 | Dok | 33,655,000 | 38 | Dok | 67,310,000 | | Kab. RN |
| | | 1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 12 | Dok | 18,355,000 | 12 | Dok | 18,355,000 | 24 | Dok | 36,710,000 | | Kab. RN |
| | | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 7 | Laporan | 15,300,000 | 7 | Laporan | 15,300,000 | 14 | Laporan | 30,600,000 | | Kab. RN |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu | | 100 | % | 2,243,937,000 | 100 | % | 2,243,937,000 | 100 | % | 4,487,874,000 | | Kab. RN |
| | | 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 30 | Org/Bln | 2,192,817,000 | 30 | Org/Bln | 2,192,817,000 | 60 | Org/Bln | 4,385,634,000 | | Kab. RN |
| | | 4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | | 12 | Dok | 51,120,000 | 12 | Dok | 51,120,000 | 24 | Dok | 102,240,000 | | Kab. RN |
| | | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat | Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu | | 100 | % | 9,000,000 | 100 | % | 9,000,000 | 100 | % | 18,000,000 | | Kab. RN |
| | | 5 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | 1 | Dok | 9,000,000 | 1 | Dok | 9,000,000 | 2 | 2% | 18,000,000 | | Kab. RN |
| | | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah | | 100 | % | 195,199,000 | 100 | % | 195,199,000 | 100 | % | 390,398,000 | | Kab. RN |
| | | 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | 1 | Paket | 1,060,000 | 1 | Paket | 1,060,000 | 2 | Paket | 2,120,000 | | Kab. RN |
| | | 7 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | | 1 | Paket | 18,700,000 | 0 | Paket | 0 | 1 | Paket | 18,700,000 | | Kab. RN |
| | | 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | | 0 | Paket | 0 | 2 | Paket | 18,700,000 | 2 | Paket | 18,700,000 | | Kab. RN |
| | | 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 2 | Paket | 25,000,000 | 2 | Paket | 25,000,000 | 4 | Paket | 50,000,000 | | Kab. RN |
| | | 10 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | 2 | Paket | 22,000,000 | 2 | Paket | 22,000,000 | 4 | Paket | 44,000,000 | | Kab. RN |
| | | 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 20 | Laporan | 128,439,000 | 20 | Laporan | 128,439,000 | 40 | Laporan | 256,878,000 | | Kab. RN |
| | | 5 | Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100 | % | 42,117,000 | 100 | % | 42,117,000 | 100 | % | 84,234,000 | | Kab. RN |
| | | 12 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | | 12 | Laporan | 3,042,000 | 12 | Laporan | 3,042,000 | 24 | Laporan | 6,084,000 | | Kab. RN |
| | | 13 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 | Laporan | 39,075,000 | 12 | Laporan | 39,075,000 | 24 | Laporan | 78,150,000 | | Kab. RN |
| | | 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | | 100 | % | 81,075,000 | 100 | % | 81,075,000 | 100 | % | 162,150,000 | | Kab. RN |
| | | 14 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 19 | Unit | 81,075,000 | 19 | Unit | 81,075,000 | 38 | Unit | 162,150,000 | | Kab. RN |
| **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman** | | | | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak | | 84.86 | % | | 84.89 | % | | 84.89 | % | | | |
| | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyaraka | | | Persentase Rumah Layak Huni Terbangun | | 56.37 | % | | 56.55 | % | | 56.55 | % | | | |
| | | **II** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni** | | **100** | **%** | **95,200,000** | **100** | **%** | **95,200,000** | **100** | **%** | **190,400,000** | **Bidang Perumahan** | Kab. RN |
| | | 7 | Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan rumah bagi korban bencana | | 2 | Unit | 95,200,000 | 2 | Unit | 95,200,000 | 4 | Unit | 190,400,000 | | Kab. RN |
| | | 15 | Rehabiltasi Rumah Bagi Korban Bencana | Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi | | 2 | Unit | 95,200,000 | 2 | Unit | 95,200,000 | 4 | Unit | 190,400,000 | | Kab. RN |
| | | **III** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase rumah layak huni terbangun** | | **56,37** | **%** | **1,898,015,000** | **56,55** | **%** | **1,723,015,000** | **100** | **%** | **3,621,030,000** | **Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan** | Kab. RN |
| | | 8 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 | Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP | | **2** | **Dokumen** | 1,050,000,000 | **2** | **Dokumen** | 875,000,000 | **4** | **Dokumen** | 1,925,000,000 | | Kab. RN |
| | | 16 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/tereview/terlegalisasi | | 2 | Dokumen | 1,050,000,000 | 2 | Dokumen | 875,000,000 | 4 | Dokumen | 1,925,000,000 | | Kab. RN, |
| | | 9 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni | | **20** | **Unit** | 848,015,000 | **20** | **Unit** | 848,015,000 | **40** | **Unit** | 1,696,030,000 | | Kab. RN |
| | | 17 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki | | 20 | Unit | 848,015,000 | 20 | Unit | 848,015,000 | 40 | Unit | 1,696,030,000 | | Kab. RN, |

| Tujuan | Sasaran | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Data Capaian Tahun Awal | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tahun 2025 | | | Tahun 2026 | | | Kond. Knj Pd Akhir Periode Renstra PD | | | | |
| | | | | | | Target | | Rp | Target | | Rp | Target | | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| | | **IV** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase Luas Lahan Pemda Bersertifikat** | | **11.27** | **%** | **200,000,000** | **12.29** | **%** | **200,000,000** | **100** | **%** | **400,000,000** | **Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan** | Kab. RN |
| | | 10 | Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daaerah Kabupaten/Kota | Jumlah sertifikat tanah pemda | | **56** | **Dokumen** | 200,000,000 | **56** | **Dokumen** | 200,000,000 | **112** | **Dokumen** | 400,000,000 | | Kab. RN |
| | | 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kab/kota | | 56 | Dokumen | 200,000,000 | 56 | Dokumen | 200,000,000 | 112 | Dokumen | 400,000,000 | | Kab. RN, |
| **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 70.00 | Poin | | 77.59 | Poin | | 77.72 | Poin | | | |
| | Terjaganya Kualias Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan | | | Indeks Kualitas Air | | 52.00 | Poin | | 52.00 | Poin | | 52.00 | Poin | | | |
| | | **V** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kehati Lingkungan Hidup** | | **100** | **%** | **300,000,000** | **100** | **%** | **300,000,000** | **100** | **%** | **600,000,000** | **Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan** | Kab. RN |
| | | 11 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup | | **1** | **Dokumen** | 300,000,000 | **1** | **Dokumen** | 300,000,000 | **2** | **Dokumen** | 600,000,000 | | Kab. RN |
| | | 19 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun | | 1 | Dokumen | 300,000,000 | 1 | Dokumen | 300,000,000 | 2 | Dokumen | 600,000,000 | | Kab. RN, |
| | | **VI** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** | | **70.00** | **Poin** | **225,000,000** | **77.59** | **Poin** | **225,000,000** | **77.72** | **Poin** | **450,000,000** | **Bidang P3L, Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan** | Kab. RN |
| | | 12 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | | **4** | **Dokumen** | 175,000,000 | **4** | **Dokumen** | 175,000,000 | **8** | **Dokumen** | 350,000,000 | | Kab. RN |
| | | 20 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut | | 2 | Dokumen | 75,000,000 | 2 | Dokumen | 75,000,000 | 4 | Dokumen | 150,000,000 | | Kab. RN, |
| | | 21 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | | 2 | Dokumen | 100,000,000 | 2 | Dokumen | 100,000,000 | 4 | Dokumen | 200,000,000 | | Kab. RN, |
| | | 13 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | | **2** | **Laporan** | 50,000,000 | **2** | **Laporan** | 50,000,000 | **4** | **Laporan** | 100,000,000 | | Kab. RN |
| | | 22 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat | Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang | | 2 | Laporan | 50,000,000 | 2 | Laporan | 50,000,000 | 4 | Laporan | 100,000,000 | | Kab. RN, |
| | | **VII** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan kehati** | | **100** | **%** | **50,000,000** | **100** | **%** | **50,000,000** | **100** | **%** | **100,000,000** | **Bidang P3L** | Kab. RN |
| | | 14 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati | | **1** | **Dokumen** | 50,000,000 | **1** | **Dokumen** | 50,000,000 | **2** | **Dokumen** | 100,000,000 | | Kab. RN |
| | | 23 | Penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun | | 1 | Dokumen | 50,000,000 | 1 | Dokumen | 50,000,000 | 2 | Dokumen | 100,000,000 | | Kab. RN, |
| | | **VIII** | **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah** | | **100** | **%** | **25,000,000** | **100** | **%** | **25,250,000** | **100** | **%** | **50,250,000** | **Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan** | Kab. RN |
| | | 15 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah | Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah | | **100** | **%** | 25,000,000 | **100** | **%** | 25,250,000 | **100** | **%** | 50,250,000 | | Kab. RN |
| | | 24 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | 20 | Dokumen | 25,000,000 | 20 | Dokumen | 25,250,000 | 40 | Dokumen | 50,250,000 | | Kab. RN, |
| | Meningkatnya Penanganan Sampah | | | Volume sampah yang dikurangi | | 1.555 | Ton | | 1.571 | Ton | | 1.604 | Ton | | | |
| | | **IX** | **PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Volume sampah yang dikurangi** | | **1.555** | **Ton** | **1,168,923,800** | **1.571** | **Ton** | **1,285,816,180** | **1.604** | **Ton** | **2,454,739,980** | **Bidang P3L** | Kab. RN |
| | | 16 | Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah terangkut | | **5.486** | **Ton** | 1,168,923,800 | **5486** | **Ton** | 1,285,816,180 | **10972** | **Ton** | 2,454,739,980 | | Kab. RN |
| | | 25 | Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | | **5.486** | Ton | 1,168,923,800 | **5,486** | Ton | 1,285,816,180 | 10,972 | Ton | 2,454,739,980 | | Kab. RN, |
| | | | | | | **100** | **%** | **6,567,121,800** | **100** | **%** | **6,509,264,180** | **100** | **%** | **13,076,385,980** | | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan dan Bidang Pertanahan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikatorindikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

## 7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1**
**Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026**

| NO | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | SATUAN | FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN | KINERJA AWAL | | TARGET CAPAIAN | | KINERJA AKHIR RENSTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REALISASI | TARGET | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak | % | (60% x % RLH Tahun N) + (14% x % Sanitasi Layak Tahun N + (26% x % Air Minum Layak Tahun N) | 81.02 | 84.82 | 84.86 | 84.89 | 84.89 |
| 2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL) | 69.59 | 70.00 | 77.59 | 77.72 | 77.72 |
| 3 | Persentase Rumah Layak Huni Terbangun | % | Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun / Total RTLH x 100 | 56.02 | 56.20 | 56.37 | 56.55 | 56.55 |
| 4 | Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | Survei kualitas secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter | 51.67 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 5 | Volume Sampah Yang Dikurangi | Ton | Jumlah volume sampah yang dikurangi | 1.544 | 1.555 | 1.571 | 1.604 | 1.604 |

## 7.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel 7.2 berikut:

**Tabel 7.2**
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**
**Tahun 2025-2026**

| NO | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR | SATUAN | FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN | KINERJA AWAL | | TARGET CAPAIAN | | KINERJA AKHIR RENSTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REALISASI | TARGET | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| | **Permendagri 86/2017** | | | | | | | |
| ASPEK | PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| A | **LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR** | | | | | | | |
| | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Air | Poin | Survei kualitas secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter | 51.67 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| | **Permendagri 18/2020** | **Indikator LPPD** | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten | % | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | % | Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten x 100 | 16.95 | 16.89 | 16.83 | 16.77 | 16.77 |
| 3 | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | % | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah di kabupaten x 100 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten | Poin | (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL) | 69.59 | 70.00 | 77.59 | 77.72 | 77.72 |
| 5 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten | % | Total volume sampah yang ditangani/Total volume timbunan sampah kabupaten | 71,66 | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 78,00 |

## 7.3. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel 7.3 berikut:

**Tabel 7.3**
**Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2026**

| NO | INDIKATOR SPM | SATUAN | FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN | KINERJA AWAL | | TARGET CAPAIAN | | KINERJA AKHIR RENSTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REALISASI | TARGET | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota | % | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# BAB VIII

# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao 2025-2026 dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao.

Baa, Januari 2024
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao,

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE-NDAO DINAS PKPLH

**Leksy N. Foeh, ST**
Pembina Utama Muda
NIP. 19711118 200003 1 003